

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, LABA BUMD, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh

Nama : ADELYA
Npm : 1505170243
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADELYA
NPM : 1505170243
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, LABA BUMD, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

Pembimbing

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Sekretaris



(H. JANURIS, S.E., M.M., M.Si.)

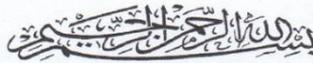
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh :
Nama Mahasiswa : ADELYA
NPM : 1505170243
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

M. FIRZA ALPI, SE, M.Si

Diketahui/ Disetujui
Oleh:

Ketua Program studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelya

NPM : 1505170243

Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan
Dan Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi
Sumatera Utara. (BPKAD Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan memperoleh data dari
internet dalam situs : www.djpk.kemenkeu.go.id.

Dan Apabila ternyata dikemudian hari data - data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil
Plagiat karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Medan, Maret 2019



ADELYA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : M. FIRZA ALFI, SE, M.Si

NAMA : ADELIA
NPM : 1505170243
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PROPOSAL : PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, LABA BUMD, DANA
ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

| Tanggal | Deskripsi Bimbingan Proposal | Paraf | Keterangan |
|---------|------------------------------|-------|------------|
| | Dasar belakang masalah | / | |
| | Dasar hukum | / | |
| | Teori di penerapan | / | |
| | Referensi | / | |
| | Pembuatan daftar pustaka | / | |
| | Alf | / | |

Medan, Januari 2019

Pembimbing Proposal

M. FIRZA ALFI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UVIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : M. FIRZA ALPI, SE, M.Si

NAMA : ADELYA
NPM : 1505170243
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, LABA BUMD, DANA
ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

| Tanggal | Deskripsi Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|-----------|--|-------|------------|
| 23/2/2019 | Bab 4 perbaikan penulisan | / | |
| 25/2/2019 | Mapa konsepsi penulisan | / | |
| 2/3/2019 | halaman baca tabel koefisien | / | |
| 5/3/2019 | Kesimpulan di padatkan penulisan | / | |
| 9/3/2019 | ACC sidang. | / | |

Pembimbing Skripsi

M. FIRZA ALPI, SE, M.Si

Medan, 9 Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

ADELYA NPM 1505170243. Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan diperoleh dari dokumentasi yang berasal dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota diprovinsi sumatera utara. Sampel dalam penelitian ini adalah Jumlah daerah yang data keuangannya lengkap setiap tahunnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 20.00. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) Retribusi Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. (2) Laba Bumd tidak berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. (4) Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara Retribusi daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Belanja Daerah Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb..

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat, hidayah dan keridhaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul : **“PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, LABA BUMD, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA”**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut :

1. Bapak **Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak, **Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **M. Firza Alpi, SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
8. Kedua orangtua Ayah **Dedi Hermanto** dan Ibu **Leli Asmawati** kedua saudaraku **Prayuda** dan **Kirana Deswita** yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Buat temen-temen seperjuangan, khususnya **Asri Dayani, Anbia Putri Syafni, Rahmadaningsih, Ok. Imam Ghozali, Rahmauli, Akbar Prayoga.**

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga Skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019
Penulis

ADELYA
NPM 1505170243

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Abstrak | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Gambar | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3 Batasan Masalah | 8 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Landasan Teori | 11 |
| 2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..... | 11 |
| 2.1.2 Pendapatan Asli Daerah | 15 |
| 2.1.3 Retribusi Daerah | 17 |
| 2.1.4 Badan Usaha Milik Daerah | 21 |
| 2.1.5 Dana Alokasi Umum | 23 |
| 2.1.6 Dana Alokasi khusus | 24 |
| 2.1.7 Belanja Daerah | 26 |
| 2.1.8 Pengaruh | 27 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.3 Kerangka Konseptual..... | 29 |
| 2.4 Hipotesis | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 34 |
| 3.2 Definisi Operasional Variabel | 34 |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian | 35 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 36 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 36 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 37 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 3.7 | Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| 4.1 | Hasil Penelitian | 43 |
| 4.1.1 | Gambaran UmumPerusahaan BPKAD | 43 |
| 4.1.2 | Visi dan misi BPKAD Provsu | 44 |
| 4.1.3 | Logo Pemprovsu..... | 45 |
| 4.1.4 | Struktur Organisasi..... | 47 |
| 4.2 | Pembahasan | 48 |
| 4.2.1 | Deskripsi Data | 48 |
| 4.2.2 | Analisis Data | 57 |
| 4.2.3 | Pembahasan | 72 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 78 |
| 5.1 | Kesimpulan | 78 |
| 5.2 | Saran | 79 |
| | Daftar Pustaka..... | 80 |
| | Lampiran ` | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Realisasi Retribusi Daerah dan Belanja Daerah | 4 |
| Tabel 1.2 | Realisasi Laba Bumddan Belanja Daerah..... | 5 |
| Tabel 1.3 | Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah | 6 |
| Tabel 1.4 | Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah | 6 |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 28 |
| Tabel 3.1 | Waktu Penelitian..... | 36 |
| Tabel 4.1 | APBD Kabupaten Asahan..... | 45 |
| Tabel 4.2 | APBD Kabupaten Dairi | 45 |
| Tabel 4.3 | APBD Kabupaten Labuhan Batu | 45 |
| Tabel 4.4 | APBD Kabupaten Mandailing Natal | 46 |
| Tabel 4.5 | APBD Kabupaten Nias | 46 |
| Tabel 4.6 | APBD Kabupaten Simalungun | 46 |
| Tabel 4.7 | APBD Kabupaten Tapanuli Tengah | 47 |
| Tabel 4.8 | APBD Kabupaten Tapanuli Utara | 47 |
| Tabel 4.9 | APBD Kota Pematang Siantar | 47 |
| Tabel 4.10 | APBD Kota Tanjung Balai | 48 |
| Tabel 4.11 | APBD Kabupaten Nias Selatan | 48 |
| Tabel 4.12 | APBD Kabupaten Deli Serdang..... | 48 |
| Tabel 4.13 | APBD Kabupaten Tapanuli Selatan..... | 49 |
| Tabel 4.14 | APBD Kabupaten Toba Samosir | 49 |
| Tabel 4.15 | APBD Kota Binjai | 49 |
| Tabel 4.16 | APBD Kota Sibolga..... | 50 |
| Tabel 4.17 | APBD Kota Tebing tinggi | 50 |
| Tabel 4.18 | APBD Kabupaten Pak-Pak Barat..... | 50 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 4.19 | APBD Kabupaten Humbang Hasundutan..... | 51 |
| Tabel 4.20 | APBD Kabupaten Samosir | 51 |
| Tabel 4.21 | APBD Kabupaten Padang Lawas | 51 |
| Tabel 4.22 | Deskripsi Data Statistik..... | 52 |
| Tabel 4.23 | Hasil Uji Kolmogrov Smirnov..... | 56 |
| Tabel 4.24 | Hasil Uji Multikolinearitas | 57 |
| Tabel 4.25 | Hasil Uji Run Test | 58 |
| Tabel 4.26 | Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... | 60 |
| Tabel 4.27 | Hasil Uji Statistik t (Parsial) | 62 |
| Tabel 4.28 | Hasil Uji Simultan (Uji F)..... | 68 |
| Tabel 4.29 | Hasil Uji Koefisien Determinasi..... | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-----------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Berberpikir..... | 31 |
| Gambar 4.1 | Logo Pemprovsu..... | 43 |
| Gambar 4.3 | Uji Heterokedastisitas..... | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama provinsi, kabupaten dan kota sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, diperlukan proses pembelajaran bagi setiap daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing di daerah. Demikian dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip Otonomi mempunyai tujuan jelas yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut (Suwarno dan Suhartiningsih, 2008).

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan antara lain konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja daerah. Yaitu sesuai pasal 37 Permendagri No 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta jaminan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam kegiatan (Nugraeni,2011).

Tingginya belanja daerah pada suatu daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah. Tingginya belanja pemerintahan ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dan kemakmuran rakyatnya, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya bahwa semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Pendapatan asli daerah tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah dapat secara leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (karo-karo,2011)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan

kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama akan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah (Halim, 2007)

Pendapatan asli daerah menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena pendapatan asli daerah ini sendiri merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. Sedangkan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik. Dana perimbangan oleh pemerintah pusat seharusnya bukan menjadikan pemerintah daerah bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan. Namun pemerintah daerah dituntut agar tetap memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2007)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2011) Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan peraturan UU No 5 tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (BPS,2003)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No 33 tahun 2004)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang digunakan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No 33 tahun 2004)

Akan tetapi alokasi belanja daerah belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Dalam hal ini dapat kita lihat dari realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sumatera utara. **Tabel. 1.1**

Realisasi Retribusi Daerah dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera utara tahun 2014-2018

| Tahun | Retribusi Daerah | | Belanja Daerah |
|-------|------------------|----------------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| 2014 | 73.214.111.645 | 25.960.642.324 | 7.808.557.310.000 |
| 2015 | 31.129.676.250 | 36.162.915.271 | 7.959.167.184.000 |
| 2016 | 34.486.923.000 | 30.025.468.718 | 9.476.423.915.000 |
| 2017 | 34.046.354.100 | 34.289.674.008 | 13.034.684.291.945 |
| 2018 | 37.595.084.600 | 31.026.329.919 | 13.867.539.478.554 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPS Provsu.

Pada realisasi tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan di realisasi retribusi daerah dari 36.162.915.271 – 30.025.468.718. tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah yang ditahun 2015 -2016 mengalami kenaikan dari 7.959.167.184.000 – 9.476.423.915.000 dan ini bertolak belakang dengan teori. Teori menyatakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2012) menyatakan bahwa dimana disimpulkan pajak retribusi mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila pajak retribusi naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Tabel. 1.2
Realisasi Laba BUMD dan Belanja Daerah Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

| Tahun | Laba BUMD | | Belanja Daerah |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| 2014 | 243.118.049.100 | 156.160.197.054 | 7.808.557.310.000 |
| 2015 | 255.650.903.282 | 250.601.153.282 | 7.959.167.184.000 |
| 2016 | 336.990.937.817 | 258.253.585.808 | 9.476.423.915.000 |
| 2017 | 295.016.362.711 | 194.504.920.697 | 13.034.684.291.945 |
| 2018 | 317.066.362.711 | 192.738.218.648 | 13.867.539.478.554 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPS Provsu.

Pada realisasi Laba bumd tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 258.253.585.808 – 194.504.920.697 tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah ditahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari 9.476.423.915.000 – 13.034.684.291.945 dan ini bertolak belakang dengan teori.

Hasil laba Bumd ini merupakan salah satu Pendapatan asli daerah , semakin banyak penerimaan Laba Bumd maka semakin meningkatkan Pendapatan asli daerah. Dengan semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Halim, Abdul 2001)

Tabel. 1.3
Realisasi Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

| Tahun | Dana Alokasi Umum | | Belanja Daerah |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| 2014 | 1.349.132.276.000 | 1.349.132.276.000 | 7.808.557.310.000 |
| 2015 | 1.139.261.371.000 | 1.139.261.371.000 | 7.959.167.184.000 |
| 2016 | 1.386.616.729.780 | 1.459.246.377.520 | 9.476.423.915.000 |
| 2017 | 2.629.224.545.000 | 2.629.224.545.000 | 13.034.684.291.945 |
| 2018 | 2.629.224.545.000 | 2.629.334.545.000 | 13.867.539.478.554 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPS Provsu.

Pada realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 1.349.132.276.000 – 1.139.261.371.000 tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah tahun 2014-2015 yang mengalami kenaikan dari 7.808.557.310.000 – 7.959.167.184.000, dan ini bertolak belakang dengan teori.

Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah jika dana alokasi umum rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Abdullah & Halim 2003).

Tabel. 1.4
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

| Tahun | Dana Alokasi Khusus | | Belanja Daerah |
|-------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| 2014 | 79.637.850.000 | 59.728.388.000 | 7.808.557.310.000 |
| 2015 | 86.812.510.000 | 47.746.880.500 | 7.959.167.184.000 |
| 2016 | 3.188.530.326.000 | 3.103.684.863.460 | 9.476.423.915.000 |
| 2017 | 4.076.460.907.000 | 3.838.053.061.062 | 13.034.684.291.945 |
| 2018 | 4.082.135.830.000 | 3.221.855.276.033 | 13.867.539.478.554 |

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPS Provsu

Pada realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 59.728.388.000 – 47.746.880.500, tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah tahun 2014-2015 yang mengalami kenaikan dari

7.808.557.310.000 – 7.959.167.184.000, dan ini bertolak belakang dengan teori.

Semakin besar dana alokasi khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah, jika dana alokasi khusus rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Abdullah & Halim 2003). Alasan peneliti memilih Objek penelitian pada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini karena berbagai alasan, diantaranya mudah dijangkau, dan perusahaan tersebut punya pengaruh yang besar dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Retribusi daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara” (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2018)**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan di realisasi retribusi daerah tetapi tidak diikuti dengan belanja daerahnya.
2. Pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan di realisasi laba bumd tetapi tidak diikuti dengan belanja daerahnya.
3. Pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan di realisasi DAU tetapi tidak diikuti dengan belanja daerahnya.
4. Pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan di realisasi DAK tetapi tidak diikuti dengan belanja daerahnya.

5. Mengetahui pengaruh dari Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, tentu diperlukannya pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Batasan penelitian terkait Belanja Daerah dibatasi hanya pada Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Provinsi Sumatera Utara

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara
2. Apakah ada Pengaruh Laba Bumd terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara
3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Apakah ada Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara
5. Apakah ada pengaruh Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini berdasarkan Perumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Laba Bumd terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Retribusi Daerah, Laba

Bumd, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan mengenai Pengaruh Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dan Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD mempunyai peran yang sangat vital dalam suatu pembangunan daerah. APBD mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelolapotensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara tepat.

a. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Halim (2012) :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Menurut Mardiasmo (2012) :

APBD merupakan Instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

b. Fungsi APBD

Peraturan menteri dalam Negri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi otorisasi.

Anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan.

Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan.

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi.

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusikan.

Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi stabilitasi.

Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

c. Struktur APBD

Merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah,
2. Belanja Daerah,
3. Pembiayaan Daerah.

1) Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai menambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 157 UU No 35 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang terdiri dari hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut :

- a) Fungsi;
- b) Organisasi;
- c) Program;
- d) Kegiatan;
- e) Kelompok belanja; dan
- f) Jenis belanja

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi-transaksi keuangan menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

d. Penyusunan APBD

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah yang terdiri dari kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip yaitu:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan maaf untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, Partisipatif, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah berikut;
2. Penyusunan rencana kebijakan umum anggaran;
3. Penetapan prioritas dan planfon anggaran sementara;
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
5. Penyusunan rancangan perda APBD;
6. Penetapan APBD

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004;96) :

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Warsito (2001;128) :

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang asing atau badan. Objek Retribusi Daerah :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

2.1.3 Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2010) :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontaprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

c. **Objek Retribusi Daerah**

Yang menjadi Objek Retribusi daerah yang berbentuk jasa, jasa yang dihasilkan terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Khusus; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

1) **Retribusi Jasa Umum**

Pengertian retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kreteria Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu,
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asasdesentralisasi,
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
- d. Jasa tersebut layakdikenakan retribusi,
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.

- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan,
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil,
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
- f. Retribusi pelayanan pasar,
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta, dan
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Pengertian Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu,
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/, dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesangghahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumahpotong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyeberangan diatas air

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan,

pengendalian. Dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi,
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum,
- c. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-Jenis Retribusi Perizinan tertentu

- a. Retribusi izin mandiri bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan, dan
- d. Retribusi izin trayek.

2.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Pengertian BUMD

BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam peraturan

pemerintah No.23 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Laba Bumd adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank, pembangunan daerah dan bagian laba bumd lainnya.

b. Ciri-ciri BUMD

1. Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
2. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodal perusahaan.
3. Didirikan peraturan daerah (Perda)
4. Dipimpin oleh Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Masa jabatan direksi selama empat tahun, bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

c. Tujuan Pendirian BUMD

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara.
2. Mengejar dan mencari keuntungan.
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil.

d. Fungsi BUMD

Fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi

membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang berdasarkan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah BUMD yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagaimana kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

2.1.5 Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Kesit Bambang Prakoso (2004) :

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang membiayai kebutuhan pembelanjaan.

b. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

1. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.

c. Tujuan Dana Alokasi Umum

Tujuan transfer Dana Alokasi Umum adalah sebagaimana pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

DAK adalah Alokasi dari anggaran dan pendapatan belanja daerah kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk didalam dana perimbangan.

b. Mekanisme Pengalokasian DAK

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah dimaksud.

c. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.

2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

d. Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria khusus.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

e. Penetapan Dana Alokasi Khusus

Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

2.1.7 Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

b. Peran Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi, terdiri dari :

1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
2. Klasifikasi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi tersebut tidak nampak dalam RKA dan DPA SKPD tetapi hanya nampak dalam APBD sebagai lampiran.

d. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Daerah

Belanja daerah menurut kelompoknya terdiri dari :

1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

kelompok belanja langsung yaitu :

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal

2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidaklangsung yaitu :

- a) Belanja pegawai
- b) Bunga
- c) Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan sosial
- f) Belanja bagi hasil
- g) Bantuan keuangan; dan
- h) Belanja tidak terduga

2.1.8 Pengaruh

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kata pengaruh.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah daya yang ada

atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

2.2 Penelitian Terdahulu

| Nama Penelitan | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|--|---|
| William Gani Septian Bayu Kristanto (2013) | Pengaruh dana alokasi umum dan khusus terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau sumatera | dana alokasi umum berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah. |
| Ade Irana (2016) | Pengaruh PAD dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah . (Survey pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) | Berdasarkan hasil penelitian dan realisasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum positif dan signifikan pengaruh yang kuat terhadap Belanja Daerah pada 9 Kota Provinsi Jawa Barat. |
| Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014) | Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung Di propinsi jawa tengah | Secara serentak variable DAU, DAK, dan PAD berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Langsung.; Secara Parsial variable DAU dan PAD, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.; Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap Belanja Langsung. |
| Muhammad fariz hanifan (2018) | Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Dana alokasi umum terhadap Belanja Daerah Kota Medan | Secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota |

| | | |
|---|--|---|
| D a l a m p e n | | Medan. Secara parsial tidak ada pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Secara parsial tidak ada pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. |
| Kapid, muh. Halim, yuli wulandari (2015) l i | Pengaruh dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu | Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap APBD. |

t

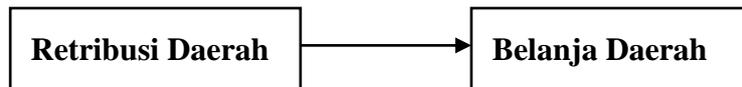
ian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari pembukuan dan pelaporan BPKAD PROVSU dan literatur berupa bacaan maupun referensi penelitian terdahulu berupa, yaitu :

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

1. Hubungan Antara Retribusi dengan Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari, Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2012) menyatakan bahwa dimana disimpulkan pajak retribusi mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila pajak retribusi naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja Daerah.



Gambar 2.1 Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah

2. Hubungan Antara BUMD dengan Belanja Daerah

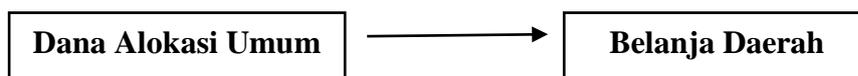
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari Bagian Laba Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Hasil laba Bumd ini merupakan salah satu Pendapatan asli daerah, semakin banyak penerimaan Laba Bumd maka semakin meningkatkan Pendapatan asli daerah. Dengan semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga semakin besar, sehingga terdapat hubungan positif antara bumd dengan belanja daerah.



Gambar 2.2 Hubungan Laba Bumd dengan Belanja Daerah

3. Hubungan Antara Dana Aloakasi Umum dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.(Abdullah & Halim 2003).

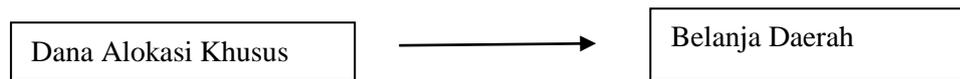


Gambar 2.3 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah

4. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah

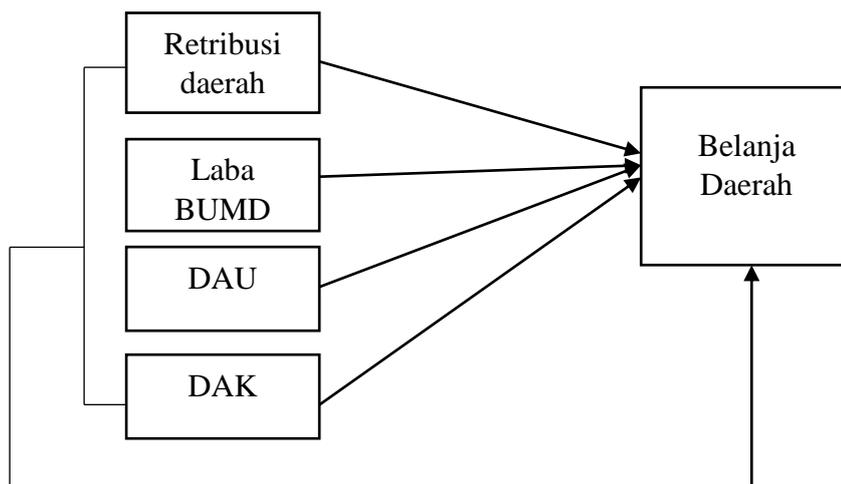
DAK adalah Alokasi dari anggaran dan pendapatan belanja daerah kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. hal tersebut

merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat menggunakan dana ini yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Semakin besar dana alokasi khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. (Abdullah & Halim 2003).



Gambar 2.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Semakin besar pendapatan daerah yang di terima suatu daerah, akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di gambarkan seperti di bawah ini



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, masing-masing hipotesis dijabarkan sebagai berikut :

- H1 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- H2 = Laba BUMD berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- H3 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- H4 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- H5 = Retribusi Daerah, Laba BUMD, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian yang bersifat angka .

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Retribusi Daerah (X1)

Retribusi Daerah Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Laba BUMD (X2)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik pemerintah daerah untuk Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

3.2.3 Dana alokasi umum (X3)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan desentralisasi pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang.

3.2.4 Dana alokasi khusus (X4)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

3.2.5 Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan. Dengan mengambil data laporan realisasi dan anggaran. selama periode 2014-2018.
- b. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan maret 2019.

Tabel. 3.1
Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
|----|-----------------------------------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pra Riset | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Judul | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan Bimbingan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 5 | Penyusunan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi Dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 daerah, yaitu 25 kabupaten dan 8 kota dari tahun 2014-2018. Sedangkan sampel penelitian ini yaitu 21 daerah dengan menggunakan teknik Purposive sampling, dengan ciri : 1. Daerah keuangan yang lengkap data nya pada setiap tahun.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data bersifat kuantitatif, sehingga dapat berupa angka atau dapat diukur dari laporan keuangan periode penelitian yang dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder dimana data tersebut telah disediakan oleh pihak perusahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2014 sampai dengan 2018 yang meliputi laporan anggaran dan realisasi melalui riset ke perusahaan tersebut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai sumber antara lain data yang tercatat di BPS dan situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linier Berganda. Analisis persamaan regresi linier Berganda adalah hubungan secara linier antara lebih satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

$$\text{rumus : } Y = a + b X_1 + c X_2 + d X_3 + e X_4$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Belanja Daerah)

a = Konstanta (Nilai Y' apabila X= 0)

b = Koefisien Regresi

X1 = Retribusi Daerah

X2 = Laba BUMD

X3 = Dana Alokasi Umum

X4 = Dana Alokasi Khusus

a. Uji Normalis Residual

Pengujian Normalis data dilakukan untuk melihat apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalis dapat dilakukan dengan uji histogram, uji P Plot, Uji Chi-Square, Skewness dan Kurtosis atau Uji Kolmogorov Smirnov (Niasari, Ratna wardani :2006)

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi. Ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (Niasari, Ratna wardani:2006).

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut Heterokedastisitas. model yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas (Niasari, Ratna wardani :2006)

d. Uji Autokorelasi

Auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi (Niasari,Ratna wardani :2006)

2. Uji Hipotesis

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai koefisien determinasi. Nilai statistik uji F dan nilai statistik uji t. Pertitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Cara yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 = 0$, berarti tidak ada pengaruh Retribusi daerah, laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.

$H_0 > 0$, berarti ada pengaruh Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.

Kriteria Penilaian:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus Daerah secara bersama-sama mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah.

- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dari H_a ditolak yang berarti bahwa Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen . uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

$H_0 = 0$, berarti tidak adapengaruh Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara parsial.

$H_0 > 0$, berarti ada pengaruh Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara parsial.

Kriteria Penilaian

- 1) Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara parsial
 - 2) Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Retribusi daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara parsial.
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau koefisien penentu R^2 merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persen, yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur kebenaran hubungan dari model yang dipakai yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians/penyebaran dari variabel independen yang menerangkan variabel dependen. Besarnya nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Umum

a. Gambaran Umum Perusahaan BPKAD

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22 /Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang– Undang R.I No.24 Tahun1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Motto Daerah, adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.Sementara BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Utara adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang baru dibentuk berdasarkan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara merupakan pergantian nama yang baru di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sebelum berganti nama menjadi BPKAD adalah dulunya dinamakann Biro Keuangan.

Adapun Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah provinsi sumatera utara terlampir sebagai berikut :

1. Visi

Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang transparan dan berdaya saing dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terpenuhinya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.

2. Misi

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi.
- b. Bertambahnya sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terciptanya tertib pengelolaan barang milik daerah untuk menuju wajar tanpa pengecualian.
- c. Meningkatkan kinerjaseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dukungan kualitas dan kuantitas barang milik daerah.

b. Makna Logo PEMPROVSU



Pengertian lambang daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara :

1. Kepala tangan yang diacungkan keatas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialis mekolonialisme, feodalisme, dan komunisme.
2. Batang Bersudut Lima, Perisai dan Rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
3. Pabrik, Pelabuhan, Pokok Karet, Pohon Sawit, Daun Tembakau, Ikan, Daun Padi dan Tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan daerah yang indah, permai dan masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
4. Tujuh Belas Kuntum Kapas, Delapan Sudut Sarang laba - laba dan Empat Puluh Lima Butir Padi menggambarkan tanggal bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga - tiganya ini berikut tongkat dibawah kepala tangan melambangkan watak.
5. Kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta, keadaan, dan pembela keadilan.
6. Bukit Barisan yang Berpuncak Lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat, persatuan kegotongroyongan yang dinamis.

4.1.2 Data Khusus

Berikut ini adalah data laporan realisasi pada seluruh kabupaten/kota di provinsi sumatera utara selama periode 2014-2018 yang berhubungan dalam penelitian ini diantaranya

yaitu jumlah Retribusi Daerah, Laba Bumd, DAU, DAK dan Belanja

Daerah, yaitu :

1. Kabupaten Asahan

Tabel 4.1
APBD Kabupaten Asahan

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 7,050,228,437 | 4,399,811,559 | 795,350,930,000 | 67,954,340,000 | 1,388,135,949,420 |
| 2015 | 9,586,406,711 | 4,399,811,559 | 891,149,644,000 | 385,699,980,000 | 1,667,941,953,825 |
| 2016 | 5,783,940,142 | 7,300,764,760 | 817,746,952,000 | 97,806,930,000 | 1,395,720,714,939 |
| 2017 | 39,233,007,558 | 10,029,770,338 | 955,691,774,290 | 373,853,195,000 | 1,550,420,215,474 |
| 2018 | 9,261,760,900 | 5,452,039,042 | 877,794,641,000 | 247,059,101,000 | 1,594,700,489,644 |

Sumber : Kemenkeu

2. Kabupaten Dairi.

Tabel 4.2
APBD Kabupaten Dairi

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 31,451,127,038 | 4,182,151,408 | 532,723,259,000 | 48,992,230,000 | 745,528,686,138 |
| 2015 | 45,717,493,000 | 7,026,751,000 | 623,702,235,000 | 100,839,350,000 | 1,113,493,269,000 |
| 2016 | 27,834,589,423 | 7,026,750,893 | 560,602,194,000 | 52,697,240,000 | 867,992,508,815 |
| 2017 | 9,266,000,000 | 19,800,000,000 | 657,581,285,622 | 158,112,934,000 | 1,125,323,136,600 |
| 2018 | 49,628,550,000 | 13,191,278,300 | 612,745,792,000 | 169,330,172,000 | 1,156,001,359,300 |

Sumber : Kemenkeu

3. Kabupaten Labuhan Batu

Tabel 4.3
APBD Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 6,717,454,841 | 6,713,719,683 | 561,476,208,000 | 40,224,710,000 | 915,110,451,097 |
| 2015 | 9,241,585,126 | 21,950,000,000 | 696,646,309,000 | 109,281,150,000 | 1,276,600,439,436 |
| 2016 | 5,348,861,488 | 10,759,754,776 | 593,025,840,000 | 76,928,200,000 | 1,019,728,251,640 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2017 | 49,550,000,000 | 5,200,000,000 | 696,646,309,000 | 205,547,825,000 | 1,357,678,632,932 |
| 2018 | 11,617,949,395 | 17,500,000,000 | 684,408,474,000 | 209,425,055,000 | 1,386,434,351,725 |

Sumber : Kemenkeu

4. Kabupaten Mandailing Natal

Tabel. 4.4
APBD Kabupaten Mandailing Natal

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 18,828,805,455 | 5,809,098,421 | 692,133,576,000 | 59,875,530,000 | 972,738,850,695 |
| 2015 | 24,302,097,000 | 10,000,000,000 | 788,477,434,000 | 347,614,673,600 | 1,586,762,381,772 |
| 2016 | 17,150,098,918 | 10,257,677,524 | 722,942,098,000 | 78,265,060,000 | 1,245,111,632,560 |
| 2017 | 20,267,538,000 | 9,000,000,000 | 788,477,434,000 | 261,707,571,000 | 1,563,819,372,565 |
| 2018 | 44,534,316,025 | 12,430,000,000 | 783,200,132,000 | 253,695,298,000 | 1,562,169,384,565 |

Sumber : Kemenkeu

5. Kabupaten Nias

Tabel. 4.5
APBD Kabupaten Nias

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 13,340,627,999 | 6,096,676,174 | 347,698,829,000 | 72,092,260,000 | 512,571,338,927 |
| 2015 | 2,206,200,000 | 10,300,000,000 | 429,582,510,000 | 224,405,712,240 | 897,819,234,639 |
| 2016 | 2,590,425,480 | 9,562,922,460 | 365,879,173,000 | 148,939,010,000 | 666,992,376,342 |
| 2017 | 5,005,000,000 | 18,000,000,000 | 442,479,925,600 | 160,659,768,000 | 884,079,808,591 |
| 2018 | 2,731,000,000 | 9,000,000,000 | 442,822,379,600 | 174,985,670,000 | 889,844,186,226 |

Sumber : Kemenkeu

6. Kabupaten Simalungun

Tabel. 4.6
APBD Kabupaten Simalungun

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 29,406,039,065 | 9,590,065,221 | 1,077,985,764,000 | 78,063,890,000 | 1,648,278,603,129 |
| 2015 | 10,076,451,399 | 18,000,000,000 | 1,230,816,187,000 | 141,590,270,000 | 2,218,399,016,011 |
| 2016 | 9,872,759,598 | 14,986,292,104 | 1,084,973,726,000 | 99,997,710,000 | 1,824,943,465,853 |
| 2017 | 75,350,000,000 | 40,360,000,000 | 1,297,673,223,692 | 427,876,001,000 | 2,304,907,688,629 |
| 2018 | 16,403,500,000 | 25,500,000,000 | 1,230,816,187,000 | 396,528,810,000 | 3,156,679,451,580 |

Sumber : Kemenkeu

7. Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 4.7
APBD Kabupaten Tapanuli Tengah

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 5,798,178,860 | 5,241,384,126 | 541,491,907,000 | 75,689,840,000 | 755,512,922,220 |
| 2015 | 4,028,651,000 | 8,720,621,000 | 633,513,831,000 | 320,963,341,000 | 1,193,876,254,900 |
| 2016 | 3,070,920,189 | 8,720,620,709 | 558,241,964,000 | 174,579,680,000 | 967,245,794,229 |
| 2017 | 15,000,000,000 | 7,750,000,000 | 633,513,831,000 | 175,064,603,000 | 1,091,824,630,924 |
| 2018 | 4,679,874,000 | 12,654,343,363 | 627,027,553,000 | 257,400,378,000 | 1,221,955,189,000 |

Sumber : Kemenkeu

8. Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel. 4.8
APBD Kabupaten Tapanuli Utara

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 36,162,112,657 | 4,481,772,418 | 596,841,256,000 | 48,316,860,000 | 816,538,465,051 |
| 2015 | 30,520,000,000 | 7,250,000,000 | 650,827,006,000 | 156,894,240,000 | 1,304,677,090,244 |
| 2016 | 38,136,335,569 | 7,442,520,126 | 616,216,474,000 | 123,348,680,000 | 1,097,187,075,012 |
| 2017 | 11,910,849,266 | 3,661,206,762 | 650,827,006,000 | 170,227,230,000 | 1,198,948,378,696 |
| 2018 | 8,373,500,000 | 7,750,000,000 | 639,394,068,000 | 203,770,263,000 | 1,340,257,756,521 |

Sumber : Kemenkeu

9. Kota Pematang Siantar

Tabel. 4.9
APBD Kota Pematang Siantar

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 11,965,498,400 | 5,301,473,976 | 519,435,661,000 | 32,662,570,000 | 774,365,721,075 |
| 2015 | 9,756,178,000 | 12,701,664,506 | 593,532,667,000 | 197,189,420,540 | 1,043,382,390,482 |
| 2016 | 5,801,756,500 | 7,310,842,149 | 536,792,310,000 | 50,467,450,000 | 884,146,657,676 |
| 2017 | 38,200,000,000 | 14,398,829,015 | 593,532,667,000 | 141,131,508,000 | 1,063,470,020,440 |
| 2018 | 13,299,773,000 | 8,386,970,226 | 583,106,207,000 | 196,050,575,000 | 997,384,585,394 |

Sumber : Kemenkeu

10. Kota Tanjung Balai

Tabel. 4.10
APBD Kota Tanjung Balai

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 23,868,275,086 | 3,566,499,158 | 387,259,055,000 | 25,520,490,000 | 571,815,160,220 |
| 2015 | 25,601,771,484 | 5,400,000,000 | 418,170,500,000 | 149,653,680,000 | 720,036,003,766 |
| 2016 | 22,062,143,271 | 6,164,773,881 | 398,405,838,000 | 29,526,528,000 | 586,384,496,854 |
| 2017 | 11,658,500,000 | 13,000,000,000 | 418,850,996,000 | 98,927,697,000 | 693,917,029,628 |
| 2018 | 24,650,846,400 | 6,000,000,000 | 418,666,416,000 | 95,263,859,000 | 831,473,050,228 |

Sumber : Kemenkeu

11. Kabupaten Nias Selatan

Tabel. 4.11
APBD Kabupaten Nias Selatan

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 2,563,910,787 | 1,388,314,208 | 462,793,387,000 | 90,900,703,945 | 719,011,176,949 |
| 2015 | 4,785,675,000 | 1,527,145,629 | 540,753,630,000 | 204,885,804,000 | 1,093,581,486,484 |
| 2016 | 3,087,669,970 | 2,524,262,571 | 468,405,844,000 | 127,206,270,000 | 855,252,081,779 |
| 2017 | 4,542,498,390 | 2,683,962,200 | 543,052,446,000 | 200,595,819,000 | 1,147,761,807,054 |
| 2018 | 4,537,087,000 | 4,160,000,000 | 556,410,357,000 | 205,201,148,000 | 1,242,459,520,511 |

Sumber : Kemenkeu

12. Kabupaten Deli Serdang

Tabel 4.12
APBD Kabupaten Deli Serdang

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 89,748,967,887 | 9,959,571,858 | 1,363,811,250,000 | 104,687,700,000 | 2,392,252,735,840 |
| 2015 | 123,673,321,114 | 7,611,631,987 | 1,396,297,620,000 | 117,332,680,000 | 2,735,624,354,971 |
| 2016 | 124,485,665,000 | 18,000,000,000 | 1,494,821,153,000 | 164,758,770,000 | 3,529,117,634,226 |
| 2017 | 112,795,775,000 | 19,800,000,000 | 1,603,084,535,000 | 498,655,747,000 | 3,497,039,137,164 |
| 2018 | 122,642,060,000 | 19,800,000,000 | 1,468,561,952,000 | 466,090,784,000 | 3,766,358,253,124 |

Sumber : Kemenkeu

13. Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel. 4.13
APBD Kabupaten Tapanuli Selatan

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 8,229,309,119 | 62,118,150,889 | 572,097,968,043 | 63,547,730,000 | 862,248,440,427 |
| 2015 | 7,444,396,307 | 39,663,676,985 | 592,764,058,000 | 107,393,930,000 | 1,119,177,035,203 |
| 2016 | 8,274,492,028 | 35,721,309,287 | 654,669,272,000 | 138,110,230,000 | 1,234,945,251,692 |
| 2017 | 8,905,927,188 | 40,360,000,000 | 654,669,272,000 | 161,854,731,000 | 1,191,928,498,270 |
| 2018 | 16,870,044,188 | 57,272,168,983 | 644,304,467,000 | 166,841,082,000 | 1,259,997,958,244 |

Sumber : Kemenkeu

14. Kabupaten Toba Samosir

Tabel. 4.14
APBD Kabupaten Toba Samosir

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 4,607,930,205 | 2,094,131,786 | 495,377,257,000 | 67,784,130,000 | 770,864,744,416 |
| 2015 | 10,786,765,764 | 3,517,084,610 | 506,843,572,000 | 78,487,330,000 | 847,198,141,270 |
| 2016 | 6,479,213,462 | 3,100,000,000 | 537,940,690,000 | 210,710,856,000 | 997,808,607,417 |
| 2017 | 6,797,281,133 | 3,661,206,762 | 557,421,053,928 | 221,113,356,000 | 1,135,016,088,660 |
| 2018 | 6,352,187,860 | 4,817,211,000 | 528,490,802,000 | 168,006,961,000 | 1,065,342,557,237 |

Sumber : Kemenkeu

15. Kota Binjai

Tabel. 4.15
APBD Kota Binjai

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 33,757,088,119 | 1,867,898,443 | 526,069,678,000 | 31,534,230,000 | 804,308,312,949 |
| 2015 | 28,835,847,161 | 3,102,955,937 | 541,895,577,000 | 40,555,310,000 | 885,211,617,571 |
| 2016 | 45,078,954,381 | 3,100,000,000 | 574,469,158,000 | 87,818,399,100 | 1,023,554,570,568 |
| 2017 | 7,348,987,598 | 4,212,978,767 | 574,469,158,000 | 120,316,335,000 | 914,618,290,540 |
| 2018 | 7,309,104,225 | 4,212,978,767 | 564,377,582,000 | 137,071,295,000 | 961,857,047,999 |

Sumber : Kemenke

16. Kota Sibolga

Tabel. 4.16
APBD Kota Sibolga

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 30,465,466,491 | 4,780,702,983 | 371,812,825,000 | 33,880,280,000 | 521,086,192,485 |
| 2015 | 33,431,608,958 | 7,830,189,882 | 380,075,078,000 | 90,670,040,000 | 594,579,551,547 |
| 2016 | 4,372,649,614 | 8,642,620,749 | 412,805,887,000 | 173,112,751,000 | 789,856,899,939 |
| 2017 | 5,011,755,321 | 14,398,829,015 | 412,805,887,000 | 82,965,831,000 | 631,329,596,721 |
| 2018 | 4,931,087,510 | 14,398,829,015 | 405,554,215,000 | 96,453,972,000 | 662,651,416,580 |

Sumber : Kemenkeu

17. Kota Tebing Tinggi

Tabel. 4.17
APBD Kota Tebing Tinggi

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 5,942,153,764 | 6,434,572,456 | 385,030,433,000 | 36,231,720,000 | 614,015,440,543 |
| 2015 | 3,960,226,742 | 10,811,176,874 | 400,236,724,000 | 48,429,780,000 | 666,789,251,488 |
| 2016 | 4,690,778,000 | 10,882,000,000 | 413,508,880,000 | 165,795,625,080 | 766,578,358,598 |
| 2017 | 4,155,778,000 | 13,000,000,000 | 428,475,763,000 | 152,783,880,000 | 737,568,472,672 |
| 2018 | 4,758,000,000 | 13,500,000,000 | 427,268,868,000 | 120,546,179,000 | 790,416,665,396 |

Sumber : Kemenkeu

18. Kabupaten Pak-pak Barat

Tabel. 4.18
APBD Kabupaten Pak-pak Barat

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 3,281,689,732 | 769,375,623 | 313,591,345,000 | 62,184,950,000 | 416,527,376,633 |
| 2015 | 3,683,631,111 | 1,233,041,208 | 326,899,366,000 | 75,644,960,000 | 489,296,966,434 |
| 2016 | 4,247,300,000 | 1,600,000,000 | 342,284,663,000 | 109,644,130,000 | 594,377,863,610 |
| 2017 | 11,046,720,000 | 1,200,000,000 | 342,284,663,000 | 85,352,804,000 | 681,429,146,086 |
| 2018 | 6,896,508,500 | 1,200,000,000 | 339,271,690,000 | 76,630,262,000 | 617,103,922,495 |

Sumber : Kemenkeu

19. Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel. 4.19
APBD Kabupaten Humbang Hasundutan

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 11,139,809,269 | 2,501,126,626 | 486,879,858,054 | 56,959,620,000 | 700,844,955,590 |
| 2015 | 4,309,655,604 | 4,123,068,317 | 511,805,111,000 | 57,149,880,000 | 772,298,662,007 |
| 2016 | 4,458,582,773 | 2,612,589,590 | 533,184,787,000 | 214,887,921,480 | 946,608,158,528 |
| 2017 | 4,573,172,815 | 2,683,962,200 | 571,801,064,876 | 199,879,554,000 | 983,547,634,280 |
| 2018 | 5,106,172,815 | 5,609,093,852 | 523,818,445,000 | 147,110,672,000 | 953,692,567,188 |

Sumber : Kemenkeu

20. Kabupaten Samosir

Tabel. 4.20
APBD Kabupaten Samosir

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 15,164,431,938 | 1,188,427,084 | 441,619,455,000 | 46,700,960,000 | 572,943,309,466 |
| 2015 | 11,365,124,389 | 2,121,810,513 | 447,470,935,000 | 59,783,850,000 | 683,544,799,847 |
| 2016 | 3,433,650,000 | 1,650,000,000 | 459,549,788,000 | 173,397,397,660 | 850,073,967,860 |
| 2017 | 7,504,500,000 | 2,469,500,000 | 476,191,394,272 | 180,446,810,000 | 902,089,052,652 |
| 2018 | 7,179,075,400 | 5,000,000,000 | 453,737,230,000 | 145,102,356,000 | 839,153,433,708 |

Sumber : Kemenkeu

21. Kabupaten Padang Lawas

Tabel. 4.21
APBD Kabupaten Padang Lawas

| Tahun | Variabel Peneliti | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Retribusi Daerah | Laba Bumd | DAU | DAK | Belanja Daerah |
| 2014 | 3,795,711,956 | 2,473,261,318 | 408,043,834,000 | 34,723,910,000 | 512,166,208,126 |
| 2015 | 2,856,057,473 | 4,082,313,320 | 427,773,483,000 | 71,711,040,000 | 785,881,634,940 |
| 2016 | 5,476,084,800 | 4,650,000,000 | 525,047,157,000 | 180,202,107,160 | 1,015,270,384,579 |
| 2017 | 5,140,468,200 | 4,600,000,000 | 525,591,211,000 | 159,115,529,000 | 1,096,235,641,141 |
| 2018 | 4,641,876,850 | 4,300,000,000 | 521,562,942,000 | 160,101,030,000 | 1,119,938,195,760 |

Sumber : Kemenkeu

Data khusus tentang Retribusi daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan belanja daerah di provinsi sumatera utara tahun 2014- 2018, dengan hasil pengumpulan data sekunder tentang realisasi Retribusi daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan belanja daerah di provinsi sumatera utara tahun 2014-2018, maka nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi deskripsi variabel peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Deskripsi Data Statistik

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Belanja Daerah | 105 | 416527376633.00 | 3766358253124.00 | 1123911970972.3142 | 623495570079.59280 |
| Retribusi Daerah | 105 | 2206200000.00 | 124485665000.00 | 18865322510.3905 | 25546901319.11422 |
| Laba BUMD | 105 | 769375623.00 | 62118150889.00 | 9778590361.2476 | 10616130860.23485 |
| Dana Alokasi Khusus | 105 | 313591345000.00 | 1603084535000.00 | 616559355809.3047 | 268635872010.27136 |
| Dana Alokasi Umum | 105 | 25520490000.00 | 498655747000.00 | 145445330198.1429 | 96451771603.68422 |
| Valid N (listwise) | 105 | | | | |

d

iatas menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing variabel penelitian. penjelasan secara rinci dari tabel tersebut adalah sebagai berikut :

a) Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 4.22 tentang deskripsi statistik data penelitian, jumlah Sampel yang diteliti sebanyak 105 . Variabel Belanja daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp.416.527.376.633 yang diperoleh dari Kab. Pak-pak barat pada

tahun 2014. Nilai maximal variabel Belanja daerah adalah sebesar Rp.3.766.358.253.124kab. Deliserdang tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) variabel belanja daerah Rp. 1.123.911.970.972sedangkan nilai standar deviasi variabel belanja daerah adalah sebesar Rp. 623.495.570.079.Penerimaan belanja daerah dari tertinggi hingga terendah tahun 2014-2018 yaitu penerimaan Belanja Daerah tertinggi adalah Kabupaten Deli serdang sedangkan penerimaan terendah adalah kabupaten Pak-pak barat.

b) Retribusi Daerah

Berdasarkan tabel 4.22 tentang deskripsi statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105. Variabel retribusi daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp.2.206.200.000 yang diperoleh dari kabupaten Niaspada tahun 2015. Nilai maximal variabel retribusi daerah adalah sebesar Rp.124.485.665.000 kabupaten Deli serdang pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Retribusi Daerah adalah Rp.18.865.322.510 sedangkan nilai standar deviasi variabel Retribusi Daerah adalah Rp.25.546.901.319. Penerimaan retribusi daerah dari tertinggi hingga terendah tahun 2014-2018 yaitu penerimaan retribusi daerah tertinggi adalah kabupaten Deli Serdang sedangkan penerimaan terendah adalah kabupaten Nias

c) Laba BUMD

Berdasarkan tabel 4.22 tentang deskripsi statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105. Variabel Laba BUMD mempunyai nilai minimal sebesar Rp.769.375.623 yang diperoleh

dari kabupaten Pak-Pak barat pada tahun 2014. Nilai maximal variabel Laba BUMD adalah sebesar Rp.62.118.150.889 kabupaten Tapanuli selatan pada tahun 2014. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Laba BUMD adalah Rp. 9.778.590.361 sedangkan nilai standar deviasi variabel Laba BUMD adalah Rp. 10.616.130.860. Penerimaan Laba BUMD dari tertinggi hingga terendah tahun 2014-2018 yaitu penerimaan Laba BUMD tertinggi adalah kabupaten Tapanuli selatan sedangkan penerimaan terendah adalah kabupaten pak-pak barat.

d) Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 4.22 tentang deskripsi statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimal sebesar Rp.313.591.345.000 yang diperoleh dari kabupaten Pak-Pak barat pada tahun 2014. Nilai maximal variabel retribusi daerah adalah sebesar Rp.1.603.084.535.000 kabupaten Deli serdang pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Dana Alokasi Umum adalah Rp.616.559.355.809 sedangkan nilai standar deviasi variabel Dana Alokasi Umum adalah Rp.268.635.872.010. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari tertinggi hingga terendah tahun 2014-2018 yaitu penerimaan Dana Alokasi Umum tertinggi adalah kabupaten Deli serdang sedangkan penerimaan terendah adalah kabupaten Pak-pak barat.

e) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan tabel 4.22 tentang deskripsi statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105. Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimal sebesar Rp.25.520.490.000 yang diperoleh dari Kota Tanjung balaipada tahun 2014. Nilai maximal variabel Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp.498.655.747.000 kabupaten Deli serdang pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Dana Alokasi Khusus adalah Rp.145.445.330.198 sedangkan nilai standar deviasi variabel Dana Alokasi Khusus adalah Rp.96.451.771.603. Penerimaan Dana Alokasi khusus dari tertinggi hingga terendah tahun 2014-2018 yaitu penerimaan Dana Alokasi Khusus tertinggi adalah kabupaten Deli serdang sedangkan penerimaan terendah adalah Kota Tanjung balai.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda. Yang bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji *normalitas*, uji *multikolinearitas*, uji *autokorelasi*, dan uji *heterokedastisitas*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal. Jika data menyebar disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Adapun uji normalitas yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov.

Tabel 4.23

Hasil Uji Kolmogrov Smirnov

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|---|----------------|----------------------------|
| N | | 105 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0002008 |
| | Std. Deviation | 144421751867. 43826000 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .144 |
| | Positive | .144 |
| | Negative | -.137 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.472 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .026 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.23 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan ($0,26 > 0,05$) artinya data antara variabel dependen dan variabel independennya memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi knormalitas karena mempunyai nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,26

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan

melihat nilai faktor inflasi varian (Variance Inflasi Fackor/VIF), yang tidak melebihi 4-5.

Tabel 4.24
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Collinearity Statistics | |
|-------------------------|-------|
| Tolerance | VIF |
| .436 | 2.292 |
| .875 | 1.143 |
| .319 | 3.133 |
| .671 | 1.490 |

Sumber : Data yang di olah

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas didapatkan hasil uji nilai VIF dibawah 5,0 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada period4 $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka digunakan uji Durbin-Watson (D-W). Uji DW dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 105

(seratus lima) dan jumlah variabel independen 4 (empat). Hasil pengujian terhadap autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.25

Hasil Uji Run Test

| Runs Test | |
|-------------------------|-------------------------|
| | Unstandardized Residual |
| Test Value ^a | 8175365296.78 |
| | 206 |
| Cases < Test Value | 52 |
| Cases >= Test Value | 53 |
| Total Cases | 105 |
| Number of Runs | 53 |
| Z | -.097 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .923 |

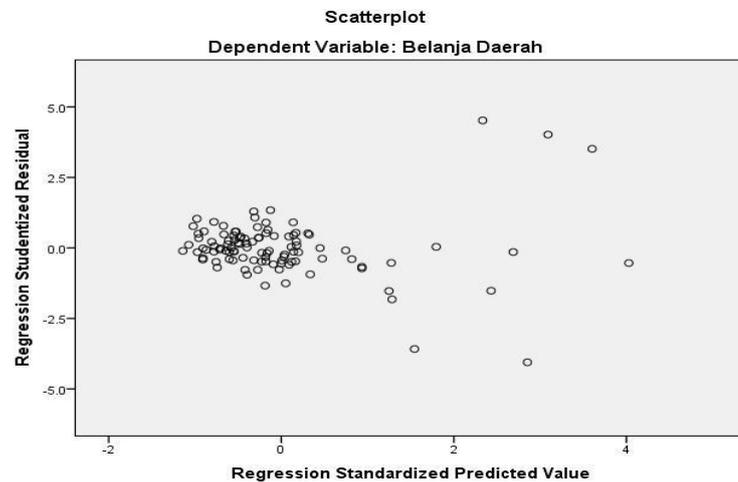
a. Median

Hasil tabel Run rest menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,923 > 0,05$. Dari hasil Run Test dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu polatertentuyang teratur, maka terjadi

heterokedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar kebawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.



Gambar 4.2

Berdasarkan hasil grafik scatterplot, terlihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar ke atas dan ke bawah 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan bantuan program bernama *Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0 for windows*. Analisis regresi linier berganda menggunakan empat variabel independen yaitu retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

$$Y = \alpha + \beta_1\chi_1 + \beta_2\chi_2 + \beta_3\chi_3 + \beta_4\chi_4 + e$$

Tabel 4.26
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | - | 41544208711. | | | |
| | | 217580647431 | 958 | | | |
| | | .690 | | | | |
| | Retribusi Daerah | 2.458 | .856 | .101 | 2.872 | .005 |
| | Laba BUMD | .747 | 1.454 | .013 | .513 | .609 |
| | Dana Alokasi Khusus | 1.806 | .095 | .778 | 18.979 | .000 |
| | Dana Alokasi Umum | 1.199 | .183 | .185 | 6.557 | .000 |

nts^a

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil output model *coefficients* di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = 0,690 + 2.458_{RD} + 0.747_{LB} + 1.806_{DAU} + 1.199_{DAK}$$

Keterangan :

- a. Konstansta sebesar 0,690 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka belanja daerah pada provinsi sumatera utara sebesar 0,690.
- b. β_1 sebesar 2.458 dengan arah hubungan Positif menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan belanja daerah sebesar 2.458 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan

- c. $\beta_2 0.747$ dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila Laba Bumd mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 0.747 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- d. $\beta_3 1.806$ dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 1.806 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- e. $\beta_4 1.199$ dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 1.199 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan empat variabel independen yaitu retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (x_1) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t = r \frac{n - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

$$1 - r^2$$

Dimana :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Bentuk pengujian :

1. $H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
2. $H_a : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- a) H_0 diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$. Df = n - 2
- b) H_0 ditolak apabila $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 20,0 maka diperoleh hasil uji statistik t sebagai berikut :

Tabel 4.27
Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Coefficients

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | - | 41544208711. | | -5.237 | .000 |
| | 217580647431 | 958 | | | |
| | .690 | | | | |
| Retribusi Daerah | 2.458 | .856 | .101 | 2.872 | .005 |
| Laba BUMD | .747 | 1.454 | .013 | .513 | .609 |
| Dana Alokasi Khusus | 1.806 | .095 | .778 | 18.979 | .000 |
| Dana Alokasi Umum | 1.199 | .183 | .185 | 6.557 | .000 |

a. D

ependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data SPSS

Hasil pengujian statistik 1 pada tabel diatas dapat dijelaskan berikut:

a) Pengaruh Retribusi Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 21 - 5 = 17$ adalah 2.110

$$t_{hitung} = 2,872$$

$$t_{tabel} = 2.110$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

H_0 = tidak ada hubungan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah.

H_a : ada hubungan antara retribusi daerah daerah terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan Keputusan :

H_0 diterima jika : $2,872 \leq t_{hitung} \leq 2.110$

H_a ditolak jika : 1 $t_{hitung} > 2,110$

$$2 - t_{tabel} < 2,110$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah diperoleh $2,872 > 2,110$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,05 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh

positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di provinsi Sumatera Utara diterima. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Apabila semakin tinggi retribusi daerah maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

b) Pengaruh Laba Bumd (X2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Laba Bumd berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 21 - 5 = 17$ adalah 2.110

$$t_{hitung} = 0,547$$

$$t_{tabel} = 2.110$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

H_0 = tidak ada hubungan antara Laba Bumd terhadap belanja daerah.

H_a : ada hubungan antara Laba Bumd terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $0,513 \leq t_{hitung} \leq 2,110$

H_a ditolak jika : $t_{hitung} > 2,110$

$$t_{hitung} < 2,110$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Laba Bumd terhadap belanja daerah diperoleh $0,513 < 2,110$. Dan

mempunyai angka signifikan sebesar $0,609 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan antara laba bumd terhadap belanja daerah pada provinsi sumatera utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu Laba Bumd berpengaruh terhadap belanja daerah di provinsi sumatera utara ditolak. Laba Bumd tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Apabila semakin tinggi Laba Bumd maka tidak akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

c) Pengaruh Dana Alokasi Umum (X3) terhadap Belanja Daerah (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 21 - 5 = 17$ adalah 2.110

$$t_{hitung} = 18,979$$

$$t_{tabel} = 2,110$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

H_0 = tidak ada hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah.

H_a : ada hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $18,979 \leq t_{hitung} \leq 2,110$

Ha ditolak jika : $t_{hitung} > 2,110$

$$2 - t_{tabel} < 2,110$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diperoleh $18,979 > 2,110$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah di provinsi Sumatera Utara diterima. Artinya apabila semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Umum maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

d) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap Belanja Daerah (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 21 - 5 = 17$ adalah 2.110

$$t_{hitung} = 6,557$$

$$t_{tabel} = 2,110$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

H_0 = tidak ada hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah.

Ha : ada hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan keputusan :

H0 diterima jika : $6,557 \leq t_{hitung} \leq 2,110$

Ha ditolak jika : $t_{hitung} > 2,110$

$$2 - t_{tabel} < 2,110$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah diperoleh $6,557 > 2,110$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah di provinsi Sumatera Utara diterima. Artinya apabila semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Khusus maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu retribusi daerah, laba BUMD, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu belanja daerah. Uji F juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

Tabel 4.28
Hasil Uji Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
| 1 | Regression | 3826046468362730 000000000.000 | 4 | 956511617090682500 000000.000 | 440.952 | .000 ^b |
| | Residual | 2169194810895828 700000000.000 | 100 | 216919481089582850 00000.000 | | |
| | Total | 4042965949452313 000000000.000 | 104 | | | |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 20.00 untuk kriteria Uji F dilakukan pada tingkat = 5% dengan nilai f untuk $F_{tabel} = n - k - 1 = 21 - 5 - 1 = 15$ adalah sebesar 4,54.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan F_{tabel} dan F_{hitung} :

H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} : 4,54 < 4,54$, pada = 5%

H_a ditolak jika : $F_{hitung} > 4,54$ atau $-F_{hitung} < 4,54$.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan probabilitasnya :

H_a diterima jika : $0,000 \leq 0,05$, pada taraf signifikansi = 5% (sig. $\leq 0,05$)

H_a ditolak jika : $0,000 \geq 0,05$

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} pengaruh retribusi daerah, laba bumd, dan Danaa alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah diperoleh 440.952 dengan signifikan 0,000. Nilai $F_{hitung}(440.952) > F_{tabel}(4,49)$, dan nilai signifikan (0,000) < dari nilai probabilitas (0,05).

Dari hasil perhitungan SPSS diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sama terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi dengan melihat nilai R^2 (Adjusted R Square), semakin besar nilai R^2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.29

Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .973 ^a | .946 | .944 | 147281866191.86453 |

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Laba BUMD, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum_a
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah_b

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,973 atau 97,3% yang berarti bahwa hubungan antara belanja daerah dengan variabel bebasnya, yaitu Retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus adalah erat. Pada nilai *R-Square* dalam penelitisn ini sebesar 0,946 yang berarti 94,6% variasi dari belanja daerah dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 5,4% dijelaskan oleh variabel lain

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai *R-Square* (R^2) atau koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,944 yang berarti 94,4% belanja daerah provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh Retribusi daerah, Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan 5,6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kemudian *standard error of the estimated* artinya mengukur variabel dari nilai yang diprediksi. *Standard error of estimated* disebut juga standar deviasi. *Standard error of the estimated* dalam penelitian ini adalah sebesar 1,472 dimana semakin kecil standar deviasi berarti model semakin baik dalam memprediksi belanja daerah.

4.2.1 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada lima (5) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara t_{hitung} sebesar 2.872 sedangkan $t_{tabel} = 2.110$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,05 > 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu retribusi daerah terhadap belanja daerah diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2012) menyatakan bahwa dimana disimpulkan pajak retribusi mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila pajak retribusi naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Dalam penelitian ini retribusi daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja daerah Artinya semakin besar Retribusi daerahnya maka belanja daerahnya juga semakin besar.

2. Pengaruh Laba BUMD Terhadap Belanja Daerah

Labanya BUMD adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank, pembangunan daerah dan bagian laba bumd lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara Laba Bumda terhadap belanja daerah di provinsi Sumatera Utara t_{hitung} sebesar $0,513 < t_{tabel}$ 2,110 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,609 > 0,05$. berarti H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan antara Laba BUMD

terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu Laba BUMD terhadap belanja daerah ditolak.

Dalam penelitian ini Laba BUMD menunjukkan tidak pengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, Artinya apabila semakin tinggi Laba Bumd maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Laba BUMD tidak signifikan ini disebabkan oleh penerimaan laba BUMD relatif masi kecil dibandingkan dengan penerimaan yang lain, sehingga kurang mampu dalam mengoptimalkan belanja daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara t_{hitung} sebesar 18,979 sedangkan $t_{tabel} = 2.110$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh muhammad fariz hanifan (2018) menyimpulkan dana alokasi umum menjadi (variabel X) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y).

Artinya apabila Dana Alokasi Umum semakin tinggi maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah nya, dimana dana alokasi umum merupakan bagian dari belanja daerah yang dianggarkan setiap tahunnya.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada daerah tertentu untuk tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara t_{hitung} sebesar 6,557 sedangkan $t_{tabel} = 2.110$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septian Bayu Kristanto (2016) menyimpulkan dana alokasi Khusus menjadi (variabel X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y).

Artinya apabila Dana Alokasi Khusus semakin tinggi maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah nya, dimana dana alokasi khusus merupakan bagian dari belanja daerah yang dianggarkan setiap tahunnya.

5. Pengaruh Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut UU No. 23 tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Laba Bumd adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank, pembangunan daerah dan bagian laba bumd lainnya.

Menurut UU No. 23 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No. 23 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada provinsi sumatera utara di peroleh nilai $F_{hitung} (328,940) >$

$F_{\text{tabel}} (4,49)$, dan nilai signifikan $(0,000) <$ dari nilai probabilitas $(0,05)$ H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara retribusi daerah, belanja daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

Artinya jika retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mengalami peningkatan secara bersama-sama maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah dimana sumber dari belanja daerah berasal dari retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diterima setiap tahunnya, dan akan dialokasikan untuk pembangunan daerah yang dibuat dalam belanja daerah setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

- a. secara parsial berpengaruh positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada provinsi sumatera utara. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Apabila semakin tinggi retribusi daerah maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.
- b. secara parsial tidak pengaruh positif dan tidak signifikan antara laba bumd terhadap belanja daerah pada provinsi sumatera utara. Laba Bumd berpengaruh terhadap belanja daerah. Apabila semakin tinggi Laba Bumd maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.
- c. secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada provinsi sumatera utara. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Apabila semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Umum maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.
- d. secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah pada provinsi sumatera utara. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Apabila semakin

tinggi penerimaan Dana Alokasi Khusus maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

- e. Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara retribusi daerah, laba bumd, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mengintruksikan kebijakan dalam meningkatkan sumber-sumber yang ada.
- b. Penerimaan retribusi daerah hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap retribusi daerah dan masyarakat harus turut serta membantu pemerintah daerah dengan membayar Retribusi Daerah atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah
- c. Peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel dan menambah cakupan daerah kabupaten dan kota atau menggunakan populasi dari wilayah atau daerah lainnya supaya hasil dari penelitian selanjutnya lebih representatif

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, Irfan, Saprihal Manurung.2015.Metodologi Penelitian Bisnis:Medan: Umsu Press
- Bambang Prakoso Kesit.2004.Pajak dan Retribusi Daerah.Jogyakarta: UII Pres.
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi, Maulidah Rahmawati. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*.Jakarta: Salemba Empat
- Halim,Abdul.2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta: Salemba Empat
- Halim,Abdul dkk,2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim,Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo.2012.Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marihot P Siahaan.2010.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pres
- Nia Sari, Ratna Wardani.2016. *Pengelolaan dan Analisa Data Statistika*.Deepublish: Jakarta
- Phaureula Artha, Emy Iryanie. (2016). *Pajak Daerah*.Jakarta:Deepublish
- Sjafrizal.(2014). *Pembangunan daerah dalam era otonomi*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Sari Nia, Ratna Wardani.2015.Pengelolaan dan Analisis Data Statistik dengan SPSS. Edisi 1. Cetakan 1.Yogyakarta: Deepublish.
- Warsito, 2001.Hukum Paja. Jakarta: PT.Raja Wali Grafindo Persada.

Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta.

Karo-Karo, Surbakti. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten-Kota Di Sumatera Utara." *Jurnal Telaah Akuntansi*, Juni 2014, Volume 17 No. 1. Universitas Negeri Medan.

Nugraeni. 2011. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota Di Indonesia)". *Jurnal Akmenika UPY*, Volume 8, 2011.

Sarwono Edy (2012). *Pengaruh Pajak Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah, Pendapatan Lainnya Sah dan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Belanja Daerah Pada Kabupaten/kota Se-Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.

Suwarno, Endro Agus, dan Suhartiningsih. 2008. "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, No. 2. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pemendagri No.13 Tahun 2006. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>

<https://wordpress.com/2015/bumd>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus

Medanbisnisdaily.com

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : ADELYA
NPM : 1505170243
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Alamat : Medan Marelan Pasar 1 Rel.

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Dedi Hermanto
Nama Ibu : Leli Asmawati
Alamat : Medan Marelan Pasar 1 Rel

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004 – 2009 : SD NEGERI 067256
2. 2010 – 2012 : SMP Yayasan Perguruan Islam YAHDHI
3. 2013 – 2015 : SMK PAB 2 Helvetia
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Hormat saya


ADELYA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 375/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 23/11/2018

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adelya
NPM : 1505170243
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar utang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu, mengetahui seberapa besar kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan penerapan tarif pajak progresifnya

Rencana Judul : 1. Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD provinsi sumatera utara
2. Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD provinsi sumatera utara
3. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD provinsi sumatera utara

Objek/Lokasi Penelitian : BPPRD provinsi sumatera utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Adelya)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 375/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2018

Nama Mahasiswa : Adelya
NPM : 1505170243
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 23/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor , atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : M. Pirza Alfi, SE, MSi (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PAD (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing) provinsi Sumatera utara.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(M. Pirza Alfi SE, MSi.)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A D E L Y A

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 2 4 3

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N
3 0 - M A Y - 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J I . M A R E L A N I S R ?
G A N G . J A B A T

Tempat Penelitian : B A D A N K E S A T U A N B A N G S
A D A N P O L I T I K P R O V S U

Alamat Penelitian : J I . J e n d r a l G A T O T S b b
r o t o N O M O R 3 G I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(... FIRDIANI SARAGIH Sg.Msi)

Wassalam
Pemohon

(... ADELYA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 9263 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 20 Rabiul Akhir 1440 H
28 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. SU
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 361
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Adelya
NPM : 1505170243
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

SPKAD

DAFTAR : 97/070

TANGGAL : 10/01/2019

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 26 /BKB.P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
2. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 9263/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Adelya
- b. Alamat : Medan
- c. Pekerja : Mahasiswa
- d. Nip/Nim/KTP : 1505170243
- e. Judul : Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
- f. Lokasi/Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
- g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
- h. Peserta : Sendiri
- i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 10 Januari 2018

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN
KEWASPADAAN NASIONAL


BUDIANTO TAMBUNAN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 - Telepon 4156000

MEDAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari: BKB. Politik

Diterima Tgl.: 10 Januari 2019

No. Surat: 070-26 / BKB. P

No. Agenda: 97 / 070.

Tgl. Surat: 10 Januari 2019

Sifat:

Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal: Penelitian

Diteruskan Kepada Sdr.:

- Sekretaris
- Kabid Pengelolaan Anggaran
- Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah
- Kabid Akuntansi
- Kabid Aset
- Kabid Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan hormat harap:

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/Konfirmasikan
-
-
-

Catatan:

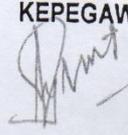
Yth. Kab. Asb ke San Kupa

- fasilitasi

Yth. Drs. Sanifudin, SE

- Conf. Disap

An. SEKRETARIS
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


Drs. ABDUL SYUKUR TAMBUNAN
PENATA Tk.I
NIP. 19670326 198611 1 001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 329/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Adelya**
N P M : **1505170243**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara**

Dosen Pembimbing : **M. Firza Alpi., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **21 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Jumadil Awwal 1440 H
21 Januari 2019 M

Dekan ✓



H. NURI SE. MM. M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 28 Januari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : ADELIA
N .P.M. : 1505170243
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 30MEI 1997
Alamat Rumah : JL.MARELAN PSR I REL
Judul/Proposal : PENGARUH RETRIBUSI DAERAH LABA BUMD,DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|---|
| Judul | |
| Bab I | - l. belah masjid - rumah masjid - rumah masjid - rumah masjid |
| Bab II | - penulisan kembali |
| Bab III | - metode penulisan - kepastian |
| Lainnya | Identifikasi penulisan |
| Kesimpulan | Perbaikan Minor Perbaikan Mayor |
| | Seminar Ulang |

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

M.FIRZA ALPI, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 28 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ADELYA
N .P.M. : 1505170243
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 30MEI 1997
Alamat Rumah : JL.MARELAN PSR I REL

JudulProposal : PENGARUH RETRIBUSI DAERAH LABA BUMD,DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *M. Firza alpi, se, m. si. 6/2.2015*

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

M.FIRZA ALPI, SE, M.SI

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.SI

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.SI



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 565 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 02 Jumadil Akhir 1440 H
07 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Jln. P. Diponegoro No. 30
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Adelya
N P M : 1505170243
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓


H. JANURI, SE, MM, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 - Telepon 4156000

MEDAN

Medan, 24 Januari 2019

Nomor : 071/140 (sekretariat)
Lampiran :
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah SU
di -
Medan.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070-26/BKB-P tanggal 8 Januari 2019 dan surat saudara Nomor : 9263/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 28 Desember 2018. Perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama :

Nama : Adelya
NPM : 1505170243
Judul : Pengaruh Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,



H. RAJA INDRA SALEH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650624 198602 1 001